



**COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA PADA
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI SETU BABAKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Mulyanto YS¹, Neneng Sri Rahayu²

Kementerian Pariwisata¹

Politeknik STIALAN Jakarta²

mulyantoys@gmail.com¹ , nenengsriahayu@stialan.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada penerapan *Collaborative Governance* dalam pengembangan destinasi wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan di DKI Jakarta. Tujuannya adalah mengeksplorasi dinamika kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat lokal, UMKM, tokoh budaya, media, akademisi, dan sektor swasta, guna mencapai pengelolaan dan promosi destinasi yang efektif. Kolaborasi ini dianggap penting untuk mempertahankan daya tarik budaya Betawi sebagai bagian dari identitas pariwisata lokal.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, didukung oleh kerangka *Collaborative Governance Regime* dari Emerson dan Nabatchi (2015). Kerangka ini menekankan pentingnya partisipasi jangka panjang yang fleksibel serta hubungan horizontal di antara pemangku kepentingan. Temuan penelitian mengindikasikan adanya beberapa kendala, seperti kurangnya keterlibatan formal antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Setu Babakan. Selain itu, analisis menunjukkan bahwa aspek seperti keragaman atraksi wisata, keterlibatan masyarakat, infrastruktur, dan promosi juga menjadi tantangan dalam mendukung Setu Babakan sebagai destinasi budaya.

Hasil penelitian merekomendasikan pembentukan kesepakatan formal melalui MoU, pembentukan tim kerja kolaboratif, dan pengembangan platform digital sebagai media komunikasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, efektivitas pengambilan keputusan, dan memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan. Di samping itu, platform digital diharapkan dapat memperluas promosi Setu Babakan sebagai destinasi budaya, memperkuat aset budaya Betawi, dan mendukung peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pariwisata, Perkampungan Budaya Betawi

ABSTRACT

This research on Collaborative Governance for Tourism Development at the Betawi Cultural Village of Setu Babakan in DKI Jakarta aims to explore the collaborative dynamics within this cultural tourism destination. Effective management and promotion of Setu Babakan rely on structured collaboration among various stakeholders, including government institutions, local communities, SMEs, cultural leaders, media, universities, and the private sector, all of whom play crucial roles in sustaining this heritage site.

Using a qualitative descriptive method with a case study approach, the research seeks a deep understanding of the factors influencing the application of collaborative governance in tourism development. Based on Emerson and Nabatchi's (2015) Collaborative Governance Regime, which stresses the need for long-term participatory systems and flexible, horizontal stakeholder relationships, the study reveals significant gaps in collaboration. Key influences on Setu Babakan's development include diverse tourist attractions, planning documentation needs, community engagement, infrastructure, and promotion efforts.

The findings indicate that, while Betawi culture is a core asset, stakeholder collaboration remains informal, with limited dialogue and no formal framework, such as MoUs or detailed SOPs, to guide the interactions. Challenges include the need for structured mediation and clearer roles within a collaborative framework. The study recommends establishing formal agreements, forming collaborative work teams, and creating digital communication platforms to strengthen coordination and improve economic outcomes. Expected results include enhanced decision-making, stronger stakeholder relationships, and optimized digital tools to promote Setu Babakan

Keywords: Collaborative Governance, Tourism, Betawi Cultural Village

PENDAHULUAN

Kedudukan Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2024, mencerminkan peran strategis Jakarta dalam konteks ekonomi dan global. Penetapan Jakarta sebagai Provinsi Daerah Khusus memberikan kewenangan khusus dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini menjadi landasan hukum untuk pengembangan kebijakan dan strategi yang mendukung posisi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Penguatan wisata budaya, terutama kebudayaan Betawi menjadi salah satu prioritas menuju pesyaratan kota Global, dimana salah satu indikator Kota global adalah memiliki daya tarik budaya yang kuat, seperti museum, pusat seni, dan acara internasional, yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan profil kota di mata dunia.

Dengan meningkatnya aktivitas pariwisata, akan tercipta permintaan akan berbagai jenis pekerjaan seperti pemandu wisata, pengelola homestay, pengrajin kerajinan lokal, dan petani organik, adanya pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan dapat meningkat. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan, kesejahteraan, dan taraf hidup masyarakat desa. Dengan memperkuat sektor pariwisata melalui pengembangan desa wisata, akan tercipta sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Hal ini akan membantu dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa terhadap perubahan eksternal.

Untuk menjadi kota global yang kompetitif, sebuah kota setidaknya perlu memiliki:

- Ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global:** Memiliki skala ekonomi yang berdaya saing, memiliki potensi (iklim) pengembangan ekonomi yang baik, memiliki sumber daya tenaga kerja yang kompetitif, dan terhubung secara global (ditunjukkan dengan keberadaan perusahaan internasional skala besar)
- Kapasitas riset dan inovasi yang baik dan menerus:** memiliki hasil riset dan inovasi dengan kuantitas dan kualitas yang mumpuni, memiliki iklim yang mendukung penciptaan riset dan inovasi, memiliki lembaga riset (termasuk universitas) yang kompetitif secara global
- Ruang yang nyaman untuk dihuni:** memiliki kelengkapan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, kondisi keamanan dan konflik sosial yang terkendali, kemudahan dalam memenuhi kehidupan, biaya hidup terjangkau, hingga kualitas sumber daya manusia yang baik (kesehatan dan pendidikan), serta kemudahan mengakses informasi
- Menarik wisatawan untuk berkunjung:** memiliki daya tarik wisata budaya, memiliki kualitas untuk menerima event-event internasional (konser, event olahraga), memiliki infrastruktur wisata (stadion, museum, teater), dan memiliki fasilitas penunjang wisata yang memadai (hotel, restoran, hiburan malam, dll)
- Lingkungan yang bersih, nyaman dan berkelanjutan:** memiliki kualitas lingkungan yang baik, berketahanan terhadap perubahan iklim, dan mengarah pada keberlanjutan
- Aksesibilitas yang terkoneksi secara intra dan inter kota:** memiliki kemudahan diakses oleh penduduk negara lain, memiliki kemudahan dan pilihan moda transportasi dalam kota, nyaman dan bebas hambatan bermobilitas di dalam kota

SUBYEK
Cultural Experience
 (Top Rank : London)
 Access to major sporting events, museums, and other expas

KARAKTERISTIK GLOBAL CITY

1. Jumlah **Wisatawan Internasional >30 juta orang / tahun**
2. Memiliki **pusat kebudayaan, museum sebanyak 240**
3. Menyelenggarakan **25 sporting event multi cabang dalam setahun**
4. Melakukan kerja sama **sister cities dengan >200 kota di dunia**

Sumber: Hasil Kajian Bergejala terhadap Indeks Kota Global

Jakcation enjoy Jakarta Jakarta Creative

Gambar 1. Kriteria Kota Global

Perkampungan budaya memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dengan menggunakan konsep wisata berbasis masyarakat. Pengelolaan pariwisata yang dimulai oleh masyarakat lokal dan didukung oleh kemitraan multipihak akan mendorong kemajuan ekonomi secara mandiri, menghasilkan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing (Efendi et al., 2021). Sektor pariwisata membantu pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Ekonomi negara yang kuat bergantung pada ekonomi lokal yang sehat; namun, perekonomian yang kuat hanya dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk membangun daerahnya (Luhut B. Pandjaitan).

Tujuan, visi, dan misi destinasi wisata menentukan seberapa efektif keterlibatan pihak dalam pengelolaan wisata. Beberapa tujuan pengembangan destinasi wisata termasuk meningkatkan karakteristik wisata, mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai objek wisata, meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat, dan memainkan peran masyarakat dan masyarakat sebagai pihak yang diuntungkan. (Itah Masitah, 2019).

Dalam perspektif pengembangan produk wisata, pemanfaatan dan pengelolaan merupakan tahap pengembangan kawasan wisata dalam menciptakan variasi produk yang menawarkan jasa dalam berbagai bentuk usaha untuk mendapatkan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat (Kasim et al., 2020). Beberapa contoh upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pengembangan budaya kota termasuk upaya untuk merevitalisasi, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Betawi dan kebudayaan daerah lainnya. Ini adalah bagian dari promosi wisata budaya DKI Jakarta. Menurut Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, pengembangan pariwisata dan wisata budaya Betawi di Setu Babakan akan berfokus pada pelestarian budaya betawi, pengembangan destinasi wisata, festival dan kuliner betawi, pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas, program edukasi dan kegiatan, dan promosi melalui media sosial.

Dari segi capaian pengunjung, Kampung Betawi Setu Babakan berkontribusi cukup besar, seperti dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 1. Kunjungan Wisata ke Perkampungan Budaya Betawi
Setu Babakan 2013-2023**

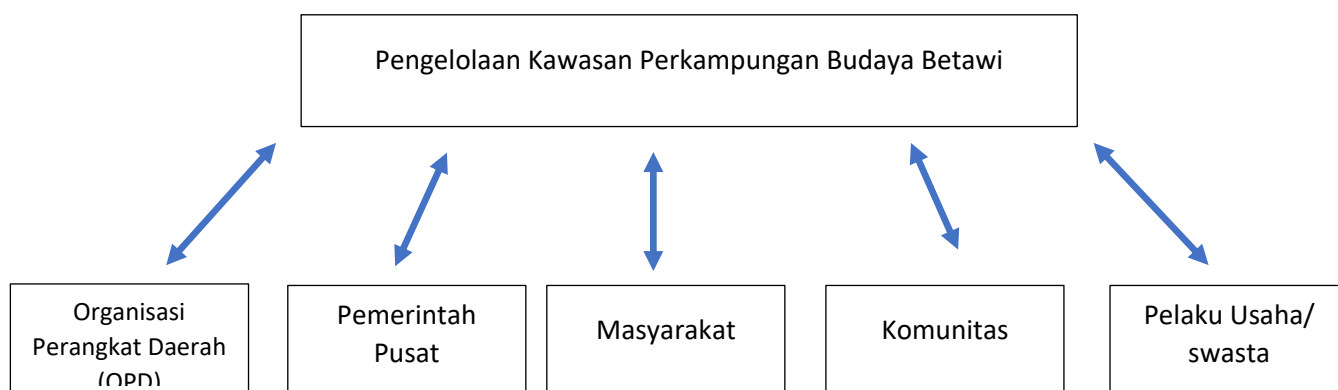
Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Jumlah
2014	204.141	216	204.357
2015	302.531	281	302.812
2016	346.557	302	346.859
2017	517.503	302	517.805
2018	437.733	33	437.766
2019	471.847	63	471.910
2020	147.784	37	147.821
2021	44.129	3	44.132
2022	225.486	30	225.516
2023	242.432	306	242.738

Sumber: Disparekraf Provinsi DKI Jakarta, 2023

Kolaborasi memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan karena tidak hanya meningkatkan kesadaran akan masalah tetapi juga membantu mengatasi akar masalah melalui kerja sama serta kolaborasi banyak membangun hal penting dalam mencapai tujuan yang keberlanjutan (Moseley, 2020). Sejalan dengan arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam Peraturan Pemerintah 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional pasal 2 bahwa pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan; tata kelola yang baik; secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan mendorong kemitraan sektor publik dan privat. Berdasarkan hal tersebut, aspek yang tidak kalah penting dalam membangun destinasi wisata adalah sinergitas antar stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Instansi Pemerintah (UKPD, OPD) dan Swasta memiliki kewajiban mendukung program dan pembangunan dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Untuk aktor non pemerintah pelaku usaha, swasta, masyarakat, komunitas dan pengunjung mendukung pengembangan pariwisata Setu Babakan melalui pemanfaatan potensi, menerima edukasi, masukan atas perencanaan dan pendampingan dalam pengelolaan destinasi wisata Setu Babakan.

Gambar 2. Stakeholder dalam Pengembangan Setu Babakan



Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 305 tahun 2014, diolah penulis (2024).

Dari uraian dan penjelasan mengenai pariwisata melalui data dukung terkait pembangunan destinasi wisata DKI Jakarta, Peneliti menganggap perlu untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan destinasi wisata budaya pada Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.

Permasalahan dalam pengembangan Setu Babakan sebagai destinasi wisata budaya Betawi di DKI Jakarta mencakup berbagai aspek yang belum optimal, baik dari segi daya tarik wisata, terutama untuk wisatawan mancanegara, maupun dari sisi dukungan pemangku kepentingan. Sebagai lokasi pelestarian budaya Betawi, pengelolaan Setu Babakan belum sepenuhnya terintegrasi dan efektif untuk menarik perhatian pengunjung, termasuk keterlibatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang masih kurang dalam hal promosi. Selain itu, dukungan program dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga terbatas, sehingga Setu Babakan belum masuk ke dalam daftar destinasi unggulan provinsi.

Tabel 2. Kunjungan Wisata Pada Obyek Wisata Unggulan 2020-2023

Objek Wisata Unggulan	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Unggulan Menurut Lokasi di DKI Jakarta			
	2020	2021	2022	2023
1. Taman Impian Jaya Ancol	2.351.961	3.248.408	13.012.020	11.293.063
2. Taman Mini Indonesia Indah	1.123.542	889.993	1.057.316	2.770.013
3. Ragunan	633.963	784.639	6.551.846	5.592.524
4. Monumen Nasional	443.034	-	5.007.359	7.321.940
5. Museum Nasional	67.088	28.700	523.141	302.929
6. Museum Satria Mandala	3.183	2.465	-	24.884
7. Museum Sejarah Jakarta	153.223	51.952	542.554	615.877
8. Pelabuhan Sunda Kelapa	16.348	32.950	12.256	27.614
Jumlah/Total	4.792.342	5.039.107	26.706.492	27.948.844

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta 2024

Lebih lanjut, perubahan status DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta dengan aspirasi kota global menekankan pentingnya daya tarik wisata budaya. Namun, pengelolaan Setu Babakan sebagai destinasi budaya lokal masih belum tertata dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kolaborasi yang lebih kuat dan pengelolaan yang lebih strategis antara stakeholder agar dapat mewujudkan Setu Babakan sebagai destinasi wisata budaya yang unggul.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus utama mengarah pada pengembangan desa wisata dalam sisi collaborative governance. Bogdan dan Taylor (Janosik, 2005) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati". Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian (Bungin, 2013).

Penelitian berjudul Collaborative Governance Pengembangan Destinasi Wisata Pada Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Provinsi DKI Jakarta akan fokus pada faktor apa yang mempengaruhi collaborative governance pengembangan destinasi wisata Setu Babakan menggunakan model CGR Emerson dan Nabatchi. Setelah dilakukan analisis faktor yang menghambat dan mendorong kebijakan pengembangan Setu Babakan, kemudian akan dirumuskan dalam bentuk model collaborative governance untuk mendorong pengembangan destinasi wisata.

Informan penelitian adalah 11 (sebelas) orang key informan terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Direktorat Manajemen Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktorat Pengembangan Destinasi I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kelurahan Srengseng Sawah, Kelompok Sadar Wisata, Perkampungan

Budaya Betawi Setu Babakan, Jurnalis media online/ pegiat media sosial, Pelaku Usaha Wisata UMKM, Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi dan Pengunjung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menjawab rumusan masalah terkait mengapa pengembangan pariwisata belum optimal dan model kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan destinasi wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan destinasi pariwisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

a. Sistem Konteks

Secara umum, gambaran system konteks pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dalam membentuk kolaborasi masing-masing aktor:

1. Daya tarik budaya Betawi menjadi aset utama, namun perlu ada perbaikan dalam infrastruktur dan partisipasi sumber daya manusia lokal untuk menjamin keberlanjutan kolaborasi.
2. Kebijakan yang jelas berperan sebagai landasan hukum yang memberikan arahan jelas bagi para aktor dalam proses kolaborasi. Dalam konteks Setu
3. Babakan, kebijakan seperti Perda No. 3 Tahun 2005 dan Pergub No. 57 Tahun 2022 memang sudah ada, menurut para informan, kebijakan ini belum cukup spesifik untuk membagi tugas dan mengatur kolaborasi secara lebih rinci. Kebijakan yang bersifat top-down dan sering kali tidak melibatkan masyarakat atau stakeholder terkait secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.
4. Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam mendukung berbagai inisiatif dalam pengembangan wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, namun distribusi kewenangan yang tidak merata menghambat keterlibatan aktif dari masyarakat dan sektor swasta.
5. Keterlibatan berbagai stakeholder belum terorganisir secara formal, dan komunikasi masih sangat bergantung pada hubungan informal. Di Setu Babakan, sudah banyak stakeholder yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan, mulai dari pemerintah daerah, UMKM, komunitas lokal, hingga sektor swasta. Namun, karena tidak ada koordinasi yang terstruktur, setiap pihak cenderung bekerja sendiri-sendiri menyebabkan kurangnya sinergi.
6. Minimnya dialog dengan melibatkan masyarakat dan beberapa masukan dan ide dari stakeholder tidak semua ditindaklanjuti mendorong situasi ketidakpercayaan di masyarakat untuk berkolaborasi.
7. Keterlibatan stakeholder dalam pengembangan pariwisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan sering kali tidak formal sehingga kurang optimal dalam mendorong pariwisata

Sebagai upaya mempromosikan dan melestarikan warisan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata terdapat beberapa elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam hal ini. Pertama, menemukan dan mengelola kekayaan budaya lokal yang dapat menarik wisatawan, seperti situs sejarah, tradisi, seni, dan kerajinan lokal. Misalnya, sebuah destinasi yang memiliki kesenian, warisan bangunan, dan kuliner dan hal-hal tradisional dapat mengadakan atraksi atau pertunjukan rutin untuk menarik pengunjung.

Dari seluruh hasil wawancara dengan para narasumber maka dapat diketahui bahwa yang menjadi hal utama perlu diperhatikan dalam pengembangan destinasi wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan adalah :

- a. Atraksi dan keragaman pilihan aktivitas wisatawan. Sebagaimana dalam wawancara dengan beberapa key informan bahwa Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan memiliki berbagai potensi atraksi. Variasi dari atraksi dan aktivitas menjadi *value* untuk menarik wisatawan
- b. Dokumen perencanaan / masterplan pembangunan kawasan. Dokumen perencanaan diperlukan sebagai guideline dalam pengembangan destinasi Perkampungan budaya Betawi setu babakan.
- c. Pelibatan dan partisipasi masyarakat. Masyarakat menjadi pelaku usaha dan pihak yang juga berinteraksi dengan pengunjung serta cerminan kualitas SDM di destinasi.
- d. Infrastruktur dan aksesibilitas menuju Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.
- e. Program promosi. Kegiatan promosi, seperti lomba, pameran, dan pagelaran, budaya Betawi dapat dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi muda serta masyarakat luas. Promosi menjadi wadah untuk menampilkan keunikan dan kekayaan budaya Betawi, serta membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengunjung tentang keberadaan Setu Babakan sebagai pusat budaya Betawi di DKI Jakarta.

b. Faktor Pendorong

Secara umum, faktor-faktor pendorong kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan:

1. Dorongan Kolaborasi muncul karena kurangnya regulasi formal yang mewajibkan kolaborasi antar-stakeholder, serta kerjasama yang masih didominasi oleh komunikasi informal, bentuk regulasi, sifat kerjasama. Inovasi, kemampuan para aktor untuk menjalin kerjasama, regulasi pemerintah dan kebutuhan ekonomi,
2. Insentif dalam kolaborasi terlihat dengan ketidakpastian dalam kolaborasi untuk pengembangan destinasi perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan digambarkan dengan tidak adanya regulasi yang mewajibkan masing-masing aktor berkolaborasi, Adapun insentif masih dalam skala lokal yaitu dampak ekonomi bagi stakeholder masyarakat dan pelaku UMKM, untuk pengelola kawasan insentif berupa upaya penataan kawasan melalui kolaborasi.
3. Aktor-aktor, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, swasta, dan media, memiliki hubungan saling ketergantungan yang kuat. Mereka tidak hanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga saling memerlukan satu sama lain untuk mempertahankan fungsi dan perkembangan kawasan.
4. Kepemimpinan inisiatif dan mendorong motivasi untuk berkolaborasi sudah tersedia dalam Pengembangan Pariwisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Namun, ketergantungan pada pimpinan untuk memulai setiap kolaborasi bisa membuat kesinambungan kerjasama terhenti jika terjadi pergantian pimpinan atau perubahan kebijakan. Kehadiran pimpinan hanya pada acara temporer atau hanya terfokus pada inisiatif event spesifik.

c. Dinamika Kolaborasi

Secara keseluruhan, disimpulkan dinamika kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan:

1. *Principled Engagement* dalam pengembangan Setu Babakan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal berbagi informasi, diskusi formal, penyusunan rencana aksi bersama, dan program tahunan. Meskipun ada upaya dari beberapa aktor untuk berbagi informasi dan melakukan koordinasi, kurangnya forum formal dan struktur yang terorganisir dengan baik menjadi hambatan utama kelangsungan kolaborasi.
2. *Shared Motivation* menunjukkan adanya motivasi bersama dari para aktor untuk melestarikan budaya Betawi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata di Setu Babakan. Namun, kolaborasi ini masih menghadapi kendala, terutama terkait kurangnya forum formal dan tidak adanya MoU yang resmi untuk mengikat kerja

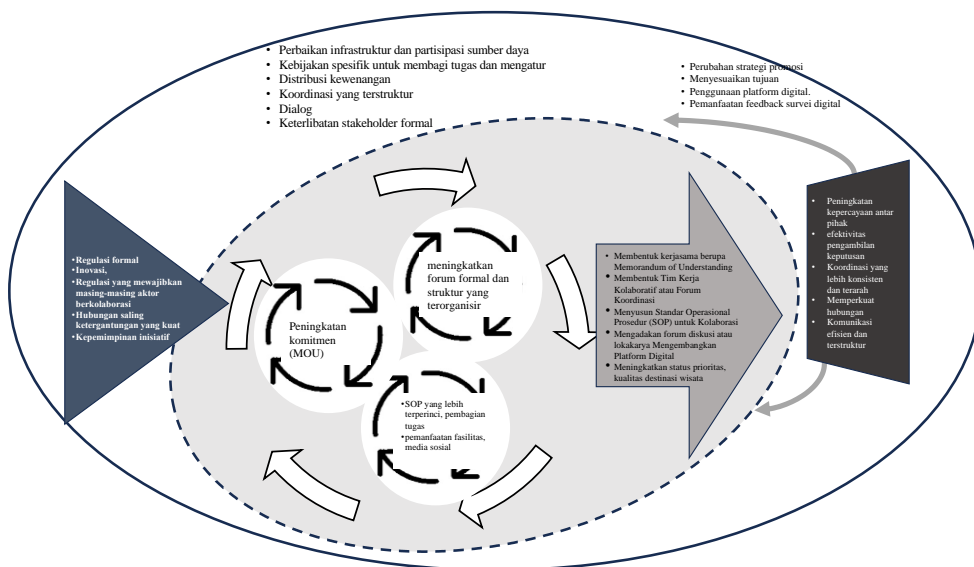
sama jangka panjang. Meskipun sudah ada inisiatif seperti FGD dan dialog informal, pelaksanaannya belum konsisten dan keterlibatan semua pihak belum optimal.

3. *Capacity for Joint Action* dalam pengembangan Setu Babakan menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya kolaborasi dari berbagai pihak, kurangnya SOP yang jelas, forum formal, serta koordinasi antar stakeholder menjadi tantangan utama. Diperlukan SOP yang lebih terperinci, pembagian tugas yang lebih terstruktur, serta peran mediator yang lebih kuat dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, pemanfaatan fasilitas pendukung harus dioptimalkan, dan promosi melalui media sosial perlu ditingkatkan untuk memperkuat posisi Setu Babakan sebagai destinasi wisata.

d. Strategi: Tindakan Kolaborasi, Hasil dan Adaptasi

Dalam Tindakan Kolaborasi, perlu melakukan berbagai bentuk kerjasama, seperti pembentukan MoU, pembentukan tim kerja kolaboratif atau forum koordinasi, penyusunan SOP kolaborasi, dan forum diskusi serta lokakarya untuk menyelaraskan visi setiap aktor. Platform digital juga dikembangkan untuk mendukung interaksi, dengan tujuan meningkatkan kualitas destinasi wisata Hasil dari kolaborasi ini adalah peningkatan kepercayaan antar pihak, efektivitas dalam pengambilan keputusan, koordinasi yang konsisten, serta hubungan yang lebih kuat dan komunikasi yang efisien. Dalam proses adaptasi, strategi promosi wisata diperbaharui, tujuan kolaborasi disesuaikan dengan perkembangan, dan platform digital digunakan sebagai alat interaktif yang terintegrasi. Feedback dari survei digital juga menjadi acuan penyempurnaan program dan fasilitas wisata Setu Babakan.

Gambar 4. Strategi Collaborative Governance Regime Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Sebagai Destinasi Wisata



Sumber: analisis Peneliti, 2024

**Tabel 3. Matriks Action Plan Strategi Collaborative Governance
Pengembangan Destinasi Wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan**

No	Program	Kegiatan	Tahun					Penanggung jawab	Output
			I	II	III	IV	V		
1	Pengembangan Destinasi Wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan	1. Membentuk Tim Kerja Kolaboratif atau Forum Tata Kelola Destinasi Wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan						Sekretariat Daerah, Biro Organisasi	Surat Keputusan Pimpinan Daerah Tim Kerja Kolaboratif atau Forum Tata Kelola Destinasi Wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan
		2. Membentuk kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MoU) Penataan Fasilitas Destinasi Wisata dan Pengembangan SDM pengelola Destinasi Wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan						Dinas Pariwisata dan Ekraf, Disbud, Pengelola Wisata	MoU dengan stakeholder potensial
		3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Koordinasi Sektor Pendukung Pariwisata, Pengembangan Kemitraan Pariwisata dan Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Atraksi Wisata Setu Babakan						Dinas Pariwisata dan Ekraf, Pengelola Wisata	SOP Koordinasi Pelaksanaan SOP Pengembangan Kemitraan Pariwisata dan SOP Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Atraksi Wisata Setu Babakan
		4. Mengadakan forum diskusi atau lokakarya Pengembangan Perkampungan						Bappeda, Dinas Pariwisata dan Ekraf, Disbud,	Lokakarya Potensi Budaya Betawi Setu Babakan, Lokakarya Inovasi Atraksi Wisata Berbasis Budaya Betawi Setu Babakan, Forum Diskusi Peran

Budaya Betawi Setu Babakan		Pengelola Wisata	Akademisi dalam Pengembangan Wisata Setu Babakan, Lokakarya Strategi Promosi Digital Setu Babakan
5. Mengembangkan Platform Digital Promosi Wisata Budaya Betawi		Dinas Pariwisata dan Ekraf, Disbud	Tersedia platform berbasis website/ aplikasi interaktif dan mampu menjaring masukan dan komunikasi untuk pariwisata
6. Penyusunan Peraturan Daerah terkait dokumen perencanaan/ Masterplan Perkampungan Budaya Betawi sebagai upaya peningkatan prioritas status pengembangan destinasi Setu Babakan		Bappeda, Dinas Parekraf	Dokumen regulasi terkait dokumen perencanaan / <i>masterplan</i> pengembangan destinasi wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Sumber: hasil analisis Peneliti, 2024

SIMPULAN

Penelitian tentang collaborative governance di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi wisata ini masih belum maksimal, meskipun Setu Babakan merupakan pusat budaya Betawi terbesar di DKI Jakarta. Kurangnya sinergi antar-pemangku kepentingan menghambat Setu Babakan dalam mengembangkan potensinya sebagai destinasi wisata budaya. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi pengembangan ini meliputi keragaman atraksi, kebutuhan dokumen perencanaan, keterlibatan masyarakat, infrastruktur, serta upaya promosi budaya Betawi yang efektif.

Dari analisis collaborative governance, terlihat bahwa pengembangan Setu Babakan sangat membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, meski interaksi antar-pemangku kepentingan masih belum memiliki struktur formal dan lebih mengandalkan komunikasi informal. Tantangan dalam kolaborasi ini termasuk ketiadaan MoU yang resmi, kebutuhan akan SOP yang lebih rinci, dan pentingnya peran mediator untuk membantu menyelesaikan perbedaan pandangan. Langkah-langkah yang disarankan dalam kolaborasi ini meliputi penyusunan MoU, pembentukan tim kerja, pembuatan SOP kolaborasi, dan pengembangan platform digital untuk memfasilitasi komunikasi.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum atau platform kolaborasi terstruktur, dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, serta regulasi formal sebagai dasar kolaborasi. Dengan komunikasi yang lebih aktif serta keterlibatan media, diharapkan Setu Babakan dapat menjadi pusat budaya Betawi yang representatif di tengah kemajuan Jakarta. Selain itu, inisiatif DKI Jakarta sebagai kota global dapat diperkuat melalui promosi Setu Babakan sebagai destinasi wisata budaya,

sehingga perannya dalam program wisata DKI Jakarta semakin diakui dan mendapat perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R. (2023). Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments. In *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. <https://doi.org/10.1353/book13050>
- Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.5>
- Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2020). Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 4(2). <https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.748>
- Ariesmansyah, A., Hari, R., Ariffin, B., & Respati, L. A. (n.d.). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA*.
- Barandiarán, X., Restrepo, N., & Luna, Á. (2019). *Collaborative governance in tourism : lessons from Etorkizuna Eraikiz in the Basque Country , Spain. August*. <https://doi.org/10.1108/TR-09-2018-0133>
- Bintoro, T. (2006). Pengantar Administrasi Pembangunan. In *Jakarta: LP3ES*.
- David Greisler, Ronald J. Stupak - *Handbook of Technology Management in Public Administration (Public Administration and Public Policy) (2006)*. (n.d.).
- Dayanti¹, E. S., & Zaenuri², M. (n.d.). *TATA KELOLA DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Kasus : Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung)*.
- Dye, T. R., Columbus, B., New, I., San, Y., Cape, F. A., Dubai, T., Madrid, L., Munich, M., Montréal, P., Delhi, T., São, M. C., Sydney, P., Kong, H., Singapore, S., & Tokyo, T. (2017). *Understanding Public Policy Fifteenth Edition*. www.pearsoned.com/permissions/.
- Edo, I. K., Susila, W., & Pramono, J. (2020). Daya Tarik Wisata Di Pura Tanah Lot Tabanan Bali Indonesia. *Jurnal.Undhirabali, November*, 419–430.
- Efendi, M., & Astuti, S. J. W. (2021). Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Ekowisata Mangrove Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 1.
- Eko Wijoyo, A., & Sri Rahayu, N. (n.d.). *Strategi Penyelesaian Sengketa Pulau Antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Politeknik STIA LAN Jakarta, Kota Jakarta Abstrak*. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/mj>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. In *Collaborative Governance Regimes*. <https://doi.org/10.1111/padm.12278>
- Fyall, A., Legohérel, P., Frochot, I., & Wang, Y. (2019). International marketing strategy. In *Marketing for Tourism and Hospitality*. <https://doi.org/10.4324/9781315651026-27>
- Gantemur, D. (2020). Nomadic tourism: stakeholder collaboration management for tourism development in Mongolia. *Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences*. <https://doi.org/10.5564/pmas.v60i3.1426>

- Handayani, S., Khairiyansyah, & Nanang, W. (2019). Fasilitas, Aksesibilitas Dan Daya Tarik Wisata Terhadap Kepuasan Wisatawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 20(2), 123–133. <https://doi.org/10.30596/jimb.v20i2.3228>
- Indrayani, I. A. D., Prabawati, N. P. A., & Yudartha, I. P. D. (2024). Collaborative Governance Berbasis Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Wisata Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1). <https://doi.org/10.61292/eljbn.151>
- Inskeep, E. (1991). Tourism Planning: An integrated and sustainable development approach van nostrand reinhold. In *New York. USA*.
- Itah Masitah. (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6.
- Kasim, S., Murianto, M., & Satria, C. (2020). PERANCANGAN MEDIA PROMOSI DESA SINTUNG SEBAGAI DESA WISATA. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(1). <https://doi.org/10.47492/jip.v1i1.45>
- Keyim, P. (2018). Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonismahti. *Journal of Travel Research*, 57(4). <https://doi.org/10.1177/0047287517701858>
- Kurniati, P. S. (2021). Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Atraksi Wisata Air Mancur Sri Baduga. *Journal of Tourism and Economic Vol.3, No.2, 2020, Page 104-112*.
- Li, X., Kim, J. S., & Lee, T. J. (2021). Collaboration for community-based cultural sustainability in island tourism development: A case in Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 13(13). <https://doi.org/10.3390/su13137306>
- Maulana, D. (2019). *KEBIJAKAN PUBLIK (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)*. <https://www.researchgate.net/publication/335612363>
- Min, H., & Yu, W. Bin. (2008). Collaborative planning, forecasting and replenishment: Demand planning in supply chain management. *International Journal of Information Technology and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1504/IJITM.2008.015886>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAMPUNG WISATA PRAIJING DI DESA TEBARA KECAMATAN KOTA WAIKABU-BAK KABUPATEN SUMBA BARAT. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2). <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Moran, M., Rein, M., & Goodin, R. E. (n.d.). *the oxford handbook of*.
- Moreta, A., & Harirah MS, Z. (2023). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022. *Journal of Social and Policy Issues*. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.180>
- National Development Planning Agency (Bappenas). (2020). Rpjmn 2020-2024. *National Mid-Term Development Plan 2020-2024*.
- Nguyen, H. Van, Diane, L., & Newsome, D. (2020). Kinh and ethnic tourism stakeholder participation and collaboration in tourism planning in Sapa, Vietnam. *International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research*, 14(4). <https://doi.org/10.1108/IJCTHR-12-2018-0179>
- Ni Made Angeliana Suwantara Putri, Putu Eka Purnamaningsih, & Ni Wayan Supriyanti. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Business and Investment Review*, 2(1). <https://doi.org/10.61292/birev.92>

- Oced. (2022). *Japan | OECD Tourism Trends and Policies 2020 | OECD iLibrary*. www.Oecd-ilibrary.Org.
- Patadjenu, S., Sondang Silitonga, M., & Asropi, A. (2023). *TATA KELOLA KOLABORATIF PENGEMBANGAN PARIWISATA LIKUPANG, KABUPATEN MINAHASA UTARA* *Tourism Development Collaborative Governance of Likupang, North Minahasa Regency*.
- Pilving, T., Kull, T., Suškevics, M., & Viira, A. H. (2022). Diverse networks in regional tourism: Ties that foster and hinder the development of rural-urban tourism collaboration in estonia. *European Journal of Tourism Research*, 30. <https://doi.org/10.54055/ejtr.v30i.2596>
- Pitana, I. G., & Putra, I. G. S. A. (2013). Pariwisata Sebagai Wahana Pelestarian Subak dan Budaya Subak Sebagai Modal Dasar dalam Pariwisata. *Jurnal Kajian Bali*, 03(02).
- PPRI. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. *Galang Tanjung*, 2504.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Russo, N. E., & Darmohraj, A. (2016). Public-private collaboration in tourism. Institutional capacities in local tourism management partnerships in Argentina. *Reforma y Democracia*, 2016-June(65).
- Santika, R. (2018). PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENIGKATKAN KESEJAHTERAN MASYARAKATDIBIDANG SIMPAN PINJAM DI DESA LOLOANKECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARATAHUN 2018-2019. *Journal Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2.
- Sentanu, I. G. E. P. S., Haryono, B. S., Zamrudi, Z., & Praharjo, A. (2023). Challenges and successes in collaborative tourism governance: A systematic literature review. In *European Journal of Tourism Research* (Vol. 33). <https://doi.org/10.54055/ejtr.v33i.2669>
- Seran, M. Y., Hutagalung, S., Rudiyanto, R., Sandrio, L., & Rostini, I. A. (2023). Analisis Konsep 3A (Atraksi, Amenitas, Akseibilitas) Dalam Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Desa Umatoos, Kabupaten Malaka). *JPTM: Jurnal Penelitian Terapan Mahasiswa*, 1(1), 27–42.
- Sharpley, R. (2017). Rural tourism and sustainability - a critique. In *New Directions in Rural Tourism*. <https://doi.org/10.4324/9781315248097-15>
- Sianipar, A. F. (2019). Efektivitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 260–267. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.1>
- Sinaga, I. C. (2021). Collaborative Governance in Tourism Development in Indonesia: Study of South Sumatera Province. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(3). <https://doi.org/10.5296/jpag.v11i3.18747>
- Sri Rahayu, N., & Marsha, A. (2023). *DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA* (Vol. 12, Issue 04). <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/3495>
sukses desa wisata 1123-2350-1-SM. (n.d.).
- Suwena, I Ketut dan Widyatmaja, I. G. N. (2017). Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata. Denpasar. In *Pustaka Larasan*.
- Swarbrooke, J. (2002). Development and Management of Visitor Attractions. *Development and Management of Visitor Attractions*.

Tanrisevdi, A., Ozdogan, O. N., Acar, V., & Kilicdere, S. (2021). Destination management: Right or wrong measures. *Journal of Global Business Insights*, 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.5038/2640-6489.6.1.1137>

The collaboration of companies in the tourism sector for solving sustainability issues. (n.d.). <https://www.researchgate.net/publication/360223666>

Undang-undang Kepariwisata. (2010). Undang-Undang Kepariwisata. *Regulasi*.

YS, M., Fajri, R., & Asropi. (2024). ANALYSIS OF COLLABORATIVE GOVERNANCE FOR THE DEVELOPMENT OF BETAWI VILLAGE TOURISM IN SETU BABAKAN, SOUTH JAKARTA. *Jurnal Pendidikan Dan Perhotelan*, 4, 18–28.

Zavaleta Chavez Arroyo, F. O., Sánchez Pantaleón, A. J., Aldea Roman, C. E., Esparza-Huamanchumo, R. M., & Álvarez-García, J. (2024). A Structural Analysis of the Economic Impact of Tourism and the Perspective of Tourism Providers in Kuélap, Peru. *Land*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/land13010120>